

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini berupaya menganalisis hubungan antara konstruksi identitas politik kelompok bersenjata etnis dan keterlibatan mereka dalam ekonomi gelap dalam konteks konflik politik di Myanmar. Dalam kondisi negara yang mengalami krisis legitimasi dan fragmentasi kekuasaan, kelompok bersenjata etnis tidak hanya berfungsi sebagai aktor militer, tetapi juga sebagai aktor ekonomi dan politik yang membangun struktur kekuasaan alternatif di wilayah konflik.

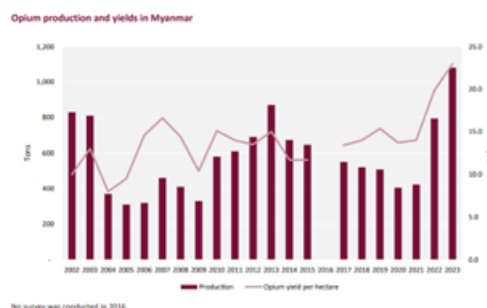
Myanmar merupakan salah satu negara dengan konflik etnis paling kompleks di Asia Tenggara. Wilayah perbatasannya, seperti Negara Bagian Shan, Kachin, dan Wa, menjadi ruang kontestasi antara pemerintah pusat yang didominasi oleh militer (Tatmadaw) dan kelompok-kelompok etnis bersenjata yang menuntut otonomi politik dan kontrol atas sumber daya lokal. Konflik panjang ini telah menciptakan ruang sosial yang diwarnai oleh kekerasan, ekonomi informal, dan perlawanan terhadap negara (Arjona, Kasfir and Mampilly 2015, 112). Dalam situasi tersebut, praktik ekonomi gelap terutama produksi dan perdagangan opium tidak hanya menjadi strategi bertahan hidup, tetapi juga sarana pembiayaan politik serta simbol kemandirian komunitas etnis yang termarginalkan.

Myanmar adalah rumah bagi 135 kelompok etnis, banyak di antaranya memiliki angkatan bersenjata sendiri. Di seluruh Myanmar, diperkirakan terdapat lebih dari 170 kelompok bersenjata yang aktif. Dalam konteks negara yang

terfragmentasi secara politik dan ekonomi pasca kudeta 2021, kelompok bersenjata seperti *Kachin Independence Army* (KIA), *United Wa State Army* (UWSA), dan *Karen National Union* (KNU) tidak hanya memainkan peran militer, tetapi juga ekonomi dan sosial di wilayah yang mereka kuasai. Aktivitas ekonomi gelap yang mereka kendalikan sering dianggap sebagai kriminalitas, namun penelitian ini berargumen bahwa praktik tersebut juga berfungsi sebagai mekanisme politik untuk mempertahankan identitas resistensi terhadap negara Myanmar yang didominasi oleh militer dan kapitalisme aktor negara.

Laporan Geopolitik yang ditulis oleh Antonio Graceffo dan dipublikasikan oleh media riset bernama *SpecialEurasia* pada Januari 2025 menjelaskan bahwa kelompok perlawanan etnis terbagi dalam dua faksi utama: pasukan perlawanan yang menentang militer dan kelompok pro militer. Pasukan perlawanan terdiri dari organisasi bersenjata etnis (EAO), yang mewakili beragam kelompok etnis di Myanmar, dan Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF), milisi anti-junta yang dibentuk setelah kudeta 2021. Dan yang mereka lawan adalah militer nasional (Tatmadaw), yang sering disebut dengan nama pemerintah junta, Dewan Administrasi Negara (Graceffo, 2025).

Gambar 1.1 Produksi dan Hasil Opium di Myanmar tahun 2002-2023



Sumber (UNODC 2023)

Sejak kudeta tahun 2021, Myanmar telah menjadi produsen opium terbesar di dunia dan produsen metamfetamin terkemuka di dunia, dengan Negara Bagian Shan sebagai pusat dari kedua industri tersebut. Pasukan Penjaga Perbatasan (BGF), yang beroperasi di bawah perlindungan Tatmadaw, bersama dengan sejumlah Organisasi Bersenjata Etnis (EAO) seperti Tentara Negara Bagian Wa Bersatu (UWSA), Tentara Negara Bagian Shan, dan Tentara Aliansi Demokrasi Nasional Myanmar (MNDAA), sangat terlibat dalam produksi dan perdagangan narkoba. Dalam beberapa kasus, bahkan faksi-faksi di dalam Tatmadaw sendiri pun terlibat.

Dalam penelitian ini kata Ekstasi merujuk pada hasrat dalam memanfaatkan kelemahan insitusi negara yang mempercepat logika akumulasi kapital berkembang secara intensif dalam kondisi konflik, sehingga menciptakan ruang bagi aktor negara maupun non-negara untuk mengakumulasikan keuntungan ekonomi melalui mekanisme formal maupun informal. Jika negara secara tradisional dipahami sebagai entitas yang memonopoli kekuasaan dan legitimasi ekonomi, maka kawasan konflik di Myanmar menunjukkan adanya pluralitas kekuasaan dan ekonomi yang beroperasi sejajar dengan negara formal.

Menurut laporan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dalam *Myanmar Opium Survey 2023*, luas lahan budidaya opium di Myanmar meningkat dari sekitar 40.100 hektar menjadi 47.100 hektar pada musim tanam 2022-2023, dengan potensi hasil mencapai 1.080 ton (UNODC, Southeast Asia Opium Survey 2023 2023). Kenaikan produksi ini terutama terjadi setelah kudeta militer 2021, yang memperlemah kontrol negara dan mendorong petani miskin di Shan dan Kachin beralih kembali ke opium sebagai komoditas utama.

Laporan *Myanmar Opium Survey 2024* menunjukkan bahwa total lahan budidaya mencapai sekitar 45.200 hektar, dengan Shan State menyumbang hampir 88% dari total nasional (UNODC 2024). Kenaikan produksi opium tersebut menunjukkan bahwa ekonomi narkoba di Myanmar tidak hanya berkaitan dengan aktivitas kriminal, tetapi juga berkaitan dengan dinamika politik konflik dan kontrol wilayah oleh kelompok bersenjata etnis (UNODC 2024).

Perbatasan timur Myanmar, terutama kawasan *Golden Triangle* yang berbatasan dengan Thailand dan Laos, memperlihatkan paradoks ekonomi dan politik yang kuat. Di satu sisi, wilayah ini dikenal sebagai pusat perdagangan narkoba internasional yang dikendalikan oleh jaringan kelompok bersenjata seperti *United Wa State Army (UWSA)* dan *Shan State Army (SSA)*. Di sisi lain, wilayah tersebut juga berfungsi sebagai “zona otonomi de facto” di mana kelompok etnis membangun struktur pemerintahan sendiri memungut pajak, mengatur perdagangan, dan menyediakan layanan sosial bagi penduduknya (Brenner, *Rebel Politics: A Political Sociology of Armed Struggle in Myanmar’s Borderland* 2019).

Keterlibatan kelompok etnis bersenjata dalam ekonomi gelap ini mencerminkan apa yang disebut William Reno (1999) sebagai “*warlord politics*” sebuah tatanan politik di mana aktor bersenjata mengontrol sumber daya ekonomi untuk mempertahankan kekuasaan dan legitimasi mereka (Reno 1999, 113). Dalam konteks Myanmar, kelompok seperti UWSA, KIA (*Kachin Independence Army*), dan TNLA (*Ta’ang National Liberation Army*) menggunakan perdagangan opium, batu giok, dan kayu sebagai sumber pendapatan utama.

Namun, kontrol mereka atas sumber daya ini tidak sepenuhnya otonom; seringkali melibatkan kompromi dengan elit politik atau militer pusat yang juga mengambil keuntungan dari ekonomi ilegal tersebut dan sekaligus menunjukkan adanya simbiosis antara aktor negara dan non-negara dalam mempertahankan kapitalisme gelap di kawasan konflik, itupun yang dikatan oleh Meehan dalam tulisannya *“Fortifying or Fragmenting the State? The Political Economy of the Opium/Heroin Trade in Shan State, Myanmar, 1988-2013”* (Meehan 2015, 277):

Third, the fact that opium is a widely distributed, rather than centralized, resource, with poppies blooming across much of Shan State, has allowed the Tatmadaw to form alliances with militias across the region, while adhering to its preferred strategy of disseminating power among various armed groups, rather than concentrating it within a small number of proxy forces”.

Meskipun secara ideologis kelompok-kelompok bersenjata ini memposisikan diri sebagai representasi perlawanan terhadap negara, praktik ekonomi mereka justru memperlihatkan peniruan terhadap logika kapitalisme negara. Dalam teori *Rebel Governance* yang dikembangkan oleh Ana Arjona, Zachariah Mampilly, dan Kasfir, kelompok pemberontak sering kali menciptakan sistem pemerintahan sendiri di wilayah yang mereka kuasai, tetapi dalam praktiknya mereka meniru model administrasi dan ekonomi negara untuk mempertahankan legitimasi (Arjona, Kasfir and Mampilly 2015, 74). Dalam konteks Myanmar, fenomena ini dapat dilihat dari cara UWSA mendirikan bank sendiri, mencetak mata uang lokal, dan menegakkan hukum suatu bentuk *“mini-state”* yang menegaskan otonomi, tetapi juga mereplikasi fungsi negara yang mereka lawan.

Masalah utama yang muncul adalah transformasi ideologi perlawanan menjadi pragmatisme ekonomi. Seiring meningkatnya ketergantungan terhadap ekonomi gelap, resistensi politik berubah menjadi instrumen ekonomi yang mengikuti logika kapitalisme. Manuel Castells dalam *The Power of Identity* menyebut hal ini sebagai pergeseran dari *Resistance Identity* identitas yang menentang kekuasaan dominan menjadi *Project Identity* yang menyesuaikan diri dengan sistem kekuasaan baru. Dalam konteks Myanmar, pergeseran ini terlihat dari bagaimana kelompok bersenjata menggunakan narasi etnis untuk membenarkan keterlibatan dalam ekonomi gelap, tetapi pada akhirnya beroperasi dalam kerangka kapitalistik yang sama dengan negara.

Dari sisi sosial, masyarakat di wilayah konflik Myanmar, terutama etnis Shan, Wa, dan Kachin, sering kali tidak punya alternatif ekonomi lain. Program pembangunan formal negara tidak menjangkau daerah mereka, sementara produksi opium menyediakan stabilitas ekonomi jangka pendek. Merujuk pada temuan dalam laporan *The State of Conflict and Violence in Asia 2021* mencatat bahwa banyak petani di Shan State menganggap opium sebagai tanaman identitas bagian dari budaya bertahan hidup yang diwariskan lintas generasi, bukan sekadar kejahatan (The Asian Foundation 2021, 93-94). Perspektif ini memperlihatkan bahwa ekonomi gelap juga berfungsi sebagai mekanisme resistensi terhadap marginalisasi ekonomi yang diproduksi oleh negara.

Seiring waktu, dinamika tersebut juga memunculkan perubahan dalam orientasi politik kelompok bersenjata etnis. Ketergantungan terhadap ekonomi gelap mendorong terjadinya transformasi dari ideologi perlawanan menuju

pragmatisme ekonomi. Manuel Castells dalam *The Power of Identity* menjelaskan fenomena ini sebagai pergeseran dari *Resistance Identity* yang dibangun untuk menentang kekuasaan dominan menuju *Project Identity*, yaitu identitas yang beradaptasi dengan struktur kekuasaan baru. Dalam konteks Myanmar, kelompok bersenjata etnis menggunakan narasi identitas etnis untuk melegitimasi keterlibatan mereka dalam ekonomi gelap, tetapi pada saat yang sama mereka juga beroperasi dalam logika kapitalisme yang serupa dengan negara yang mereka lawan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas hubungan antara konflik bersenjata dan ekonomi ilegal di Myanmar, sebagian besar studi masih berfokus pada aspek ekonomi politik perdagangan narkoba atau tata kelola wilayah oleh kelompok pemberontak. Penelitian mengenai bagaimana ekonomi ilegal berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan konflik sudah cukup berkembang, namun kajian yang secara khusus mengaitkan konstruksi identitas politik kelompok bersenjata etnis dengan keterlibatan mereka dalam ekonomi gelap masih relatif terbatas. Selain itu, perubahan dinamika politik Myanmar setelah kudeta militer 2021 juga membuka konteks baru yang belum banyak dianalisis dalam literatur sebelumnya.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana keterlibatan kelompok bersenjata etnis dalam ekonomi gelap tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan konflik, tetapi juga sebagai instrumen politik untuk membangun legitimasi, mempertahankan identitas kolektif, serta membentuk struktur kekuasaan alternatif di wilayah konflik Myanmar.

1.2 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana konstruksi *Resistance Identity* kelompok bersenjata etnis di Myanmar dalam konteks konflik politik dan ekonomi pascakudeta 2021?
2. Bagaimana praktik ekonomi gelap dan kontrol wilayah memungkinkan transformasi *Resistance Identity* menjadi *Project Identity* melalui mekanisme *Rebel Governance*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis konstruksi *Resistance Identity* kelompok bersenjata etnis di Myanmar.
2. Menjelaskan bagaimana ekonomi gelap dan kontrol wilayah memungkinkan transformasi *Resistance Identity* menjadi *Project Identity* melalui *Rebel Governance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki dua manfaat utama, yakni manfaat akademis dan manfaat praktis, yang keduanya berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman empiris tentang hubungan antara kekuasaan, ekonomi gelap, dan identitas politik di Myanmar.

1.4.1 Manfaat akademis

Secara akademis, penelitian ini berupaya memperluas khazanah studi Hubungan Internasional, khususnya dalam studi konflik, identitas politik, dan peran

aktor non-negara dalam pembentukan struktur kekuasaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai konstruksi identitas perlawanan serta dinamika transformasi kelompok bersenjata menjadi bentuk pemerintahan alternatif dalam konteks konflik politik dan ekonomi di Myanmar.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika konflik di Myanmar, khususnya terkait peran kelompok bersenjata etnis dalam membangun identitas perlawanan dan membentuk struktur pemerintahan alternatif. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, peneliti, maupun pembuat kebijakan dalam memahami kompleksitas konflik etnis dan politik di Myanmar.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas enam bab yang disusun secara sistematis untuk memudahkan alur pembahasan dan memperjelas arah analisis terhadap fenomena yang dikaji. Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik akademis maupun praktis, serta sistematika penulisan. Bab kedua memuat reviu literatur dan kerangka teoritik.

Bab ketiga membahas Konfigurasi Kekuasaan dan Ekonomi Politik Negara Myanmar. Bab keempat membahas Identitas Perlawanan dan Ekonomi Gelap. Selanjutnya, Bab kelima Transformasi Perlawanan menuju *Rebel Governance*. Bab keenam merupakan penutup, yang berisi kesimpulan penelitian serta rekomendasi.